BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program pencegahan KDRT merupakan sebuah usaha langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah & masyarakat guna mengurangi KDRT. Program ini merupakan bagian dari Perda No.5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Regulasi tersebut turut menjelaskan bahwa perlindungan perempuan & anak terdiri atas 1) program pencegahan tindak kekerasan termasuk KDRT 2) perlindungan berdasarkan hukum 3) pemulihan dari tindak kekekerasan 4) koordinasi antar berbagai pihak.

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 mengenai PPA bab 1 pasal 1 juga menjelaskan bawah kekerasan terbagi menjadi kekerasan pada perempuan & anak. Menurut pasal tersebut kekerasan pada perempuan merupakan semua perilaku berdasarkan jenis kelamin yang berbeda dan berdampak atau mungkin berdampak kesulitan atau penderitaan wanita (mental & fisik) serta ancaman perilaku & pengambilan kebebasan dengan tidak adil. Sedangkan kekerasan anak adalah semua perilaku kepada anak yang berdampak kesengsaraan atau penderitaan & perilaku buruk pada anak. Pencegahan kekerasan kepada wanita & anak merupakan suatu pekerjaan bersama antar berbagai stakeholder pemerintah dan non pemerintah (Santoso, 2019). Freeman & McVea (2001) menjelaskan

bahwa stakeholder merupakan kelompok & individu yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi dalam meraih tujuan.

Peran stakeholder sendiri diartikan sebagai keterlibatan stakeholder dalam suatu program (Nugroho, 2014). Stakeholder adalah individu, perkumpulan, organisasi laki-laki ataupun wanita yang mempunyai urusan terkait atau dipengaruhi baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan program pembangunan (Hertifah, 2003). Soesilo (2000) menekankan bahwa usaha atau kegiatan yang melibatkan stakeholder harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang menjadi stakeholder utamanya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya stakeholder yang terlibat dengan tujuan utamanya saling berkaitan (Susilo dkk., 2019). Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam implementasi program membutuhkan hubungan yang baik antar stakeholder, sesuai dengan pendapat dari (Susilo dkk., 2019). Peran stakeholder dalam pencegahan KDRT perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki peranan utama dalam perlindungan warga negaranya.

Menurut (Mahfud dkk, 2016) permasalahan yang dihadapi stakeholder pada umumnya berupa belum optimalnya peran dari semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program. Belum optimalnya peran stakeholder yang terlibat menurut (Wati, 2018) ditunjukkan dengan 1) kurangnya komitmen anggota PPT Seruni Semarang dalam mencegah KDRT di Kota Semarang 2) kurang tersedianya sumber daya finansial 3) ketimpangan tugas pokok & fungsi

organisasi serta 4) struktur birokrasi yang rumit & membutuhkan waktu lama sehingga memungkinkan kebocoran data & informasi korban. Sejalan dengan penelitian (Wati, 2018) menurut (Putrihartiwi, 2017); (Utami, 2016); kendala yang muncul mengenai peran stakeholder adalah 1) bentuk koordinasi stakeholder yang membuat bingung bahkan cenderung tidak jelas 2) adanya ketimpangan tugas pokok & fungsi serta 3)kurangnya komitmen antar stakeholder.

Hasil penelitian oleh (Satriani, 2017) mengungkapkan komitmen dan komunikasi yang dinilai kurang antar anggota, adanya kekurangan SDM menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Sementara itu (Mahartiwi, 2018) menyatakan kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat menjadi faktor yang menghambat untuk melaksanakan perlindungan. Mahartiwi (2018) lebih lanjut menjelaskan bahwa kurang konsistennya penyampaian sosialisasi mengenai perda perlindungan perempuan dan anak turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Belum adanya konsistensi sosialisasi oleh stakeholder DP3A Kota Semarang yaitu sosialisasi yang awalnya dilaksanakan sampai level Rukun Tetangga, namun dewasa ini hanya dilaksanakan lewat Karang Taruna serta LPMK. Selain permasalahan tersebut, kurang jelasnya komunikasi oleh para stakeholder terhadap masyarakat melalui komunikasi media cetak serta langsung menyebabkan masyarakat belum dapat menangkap secara jelas informasi mengenai perlindungan perempuan.

Belum optimalnya peran stakeholder tersebut juga diperparah adanya *overlapping* untuk membagi tugas yang membuat kinerja dari SDM stakeholder DP3A Kota Semarang menjadi kurang maksimal dalam perlindungan perempuan korban kekerasan (Mahartiwi, 2018). Sementara itu (Wati, 2018) menjelaskan bahwa belum semua dinas yang tergabung sebagai anggota PPT Seruni mempunyai komitmen untuk melaksanakan pelayanan pencegahan KDRT di Kota Semarang hal itu disebabkan belum adanya rasa kepedulian dan rasa memiliki kepentingan dalam pelaksanaan program menyebabkan peran stakeholder semakin belum optimal. Belum optimalnya peran stakeholder dalam program Pencegahan KDRT juga ditunjukkan dengan tingginya angka (KDRT) di Semarang. Berdasarkan data dari DP3A Kota Semarang (1 Januari 2016 – 31 Desember 2020) menempatkan jenis kasus KDRT sebagai jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Semarang, dengan 421 kasus KDRT). Data tersebut semakin memperkuat bukti bahwa pelaksanaan peran stakeholder dalam Pencegahan KDRT di Semarang masih berjalan belum optimal.

Tabel 1.1

Jumlah Kekerasan Per Kecamatan di Kota Semarang Tanggal 1 Januari 2016-31 Desember 2020

NO	KECAMATAN	KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP	TOTAL
1	MIJEN	15	16	0	0	6	37
2	GUNUNG PATI	10	35	0	2	3	50
3	BANYUMANIK	10	29	1	3	3	46
4	GAJAH MUNGKUR	2	25	0	1	3	31
5	SEMARANG SELATAN	6	12	1	0	0	19
6	CANDISARI	4	18	2	2	2	28
7	TEMBALANG	16	42	5	2	7	72
8	PEDURUNGAN	16	52	0	0	10	78
9	GENUK	9	17		2	1	29
10	GAYAMSARI	11	26	0	2	7	46
11	SEMARANG TIMUR	33	53	7	1	7	101
12	SEMARANG UTARA	7	25	0	0	5	37
13	SEMARANG TENGAH	6	15	1	0	2	24
14	SEMARANG BARAT	15	30	4	1	6	56
15	TUGU	7	9	1	0	2	19
16	NGALIYAN	5	17	0	0	1	23
		172	421	22	16	65	697

Sumber : Diolah oleh peneliti dari DP3A Semarang, (2016-2020)

Berdasarkan tabel 1.1 jenis kasus KDRT merupakan jenis yang paling sering terjadi di Semarang. Terhitung dari tanggal 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020, telah terjadi sebanyak 421 KDRT, 172 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), 22 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 16 kasus Kekerasan

KDP, dan 65 kasus KTP. Masih tingginya KDRT menjadi pertanda bahwa peran stakeholder dalam pelaksanaan Pencegahan KDRT masih belum berjalan optimal.

Tabel 1.2

Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus

No	Jenis Kasus	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1	KTA	NA	NA	83	49	40	172
2	KDRT	NA	NA	175	139	107	421
3	ABH	NA	NA	8	9	5	22
4	KDP	NA	NA	11	4	1	16
5	KTP	NA	NA	33	22	10	65
6	Traffiking	NA	NA	0	0	1	1

NA : Not Available

Sumber : Diolah oleh peneliti dari DP3A Semarang, (2016-2020)

Belum optimalnya peran stakeholder dalam pencegahan KDRT dapat dilihat dari data rasio KDRT di Semarang sepanjang tahun 2014-2018. Rasio KDRT merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah KDRT dalam satu tahun dengan perseribu jumlah rumah tangga.

Tabel 1.3

Rasio KDRT di Semarang Periode 2014-2018

No	**Tahun**	**Angka rasio KDRT**
1	2014	0,21
2	2015	0,056
3	2016	0,037
4	2017	0,053
5	2018	0,055

Sumber : Diolah oleh peneliti dari RKPD, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.3 mengenai rasio KDRT menunjukkan bahwa angka rasio KDRT di Semarang meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Angka 0,055 memiliki arti bahwa pada tahun 2018 telah terjadi 55 kasus (KDRT) perseribu rumah tangga di Kota Semarang. Meningkatnya rasio KDRT

menunjukkan bahwa upaya penurunan kasus KDRT di Kota Semarang belum berjalan secara optimal dalam menjalankan program pencegahan KDRT di Semarang.

Kasus kekerasan pada wanita terus mengalami kenaikan. Terhitung dari tahun 2015 sampai 2018 jumlah kekerasan terhadap perempuan terus bertambah dari 188 kasus tahun 2015, 199 kasus tahun 2016, 215 kasus tahun 2017 dan 271 kasus pada 2018, sesuai gambar 1.1 berikut. Bertambahnya jumlah kekerasan pada wanita menunjukkan peran stakeholder belum bisa optimal dalam mengurangi KDRT di Semarang.

Gambar 1.1

Angka Kekerasan Perempuan di Kota Semarang Periode 2015-2018

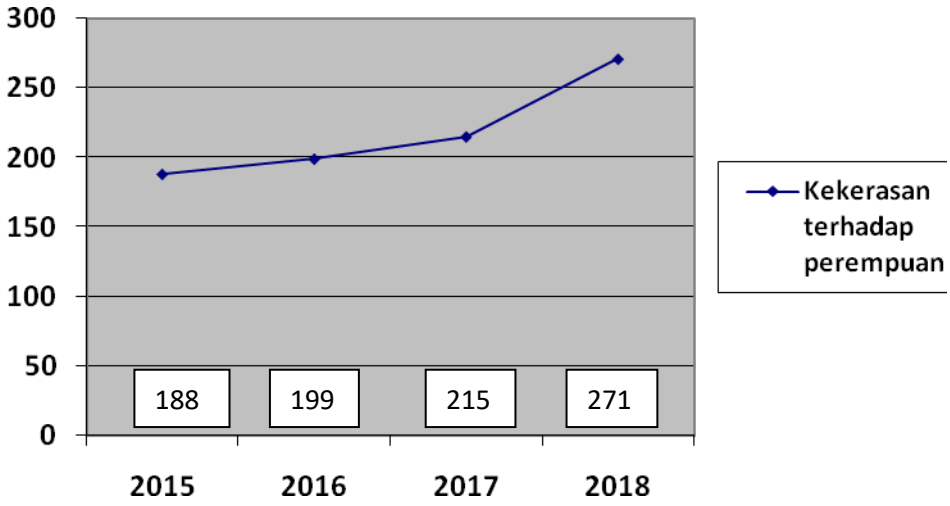

Sumber : Diolah oleh peneliti dari DP3A Semarang, 2021

Sejalan dengan permasalahan masih tingginya kasus KDRT di Semarang. Permasalahan tersebut tidak bisa hanya diatasi oleh DP3A Kota Semarang saja, terdapat berbagai stakeholder yang terlibat dalam mencegah terjadinya KDRT.

Pada pelaksanaan program pencegahan KDRT di Semarang peran sebagai *policy creator* dilimpahkan pada DP3A Semarang yang melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait yaitu PPT Seruni Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang, Dinas Sosial Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang dan pihak swasta (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) Kota Semarang. Peran setiap stakeholder dilakukan sesuai dengan pembagian peranan masing-masing dalam program pencegahan KDRT di Semarang sesuai dengan SK Walikota Semarang Nomor 463/354 Tahun 2020 mengenai penyusunan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan kekerasan pada wanita dan anak Kota Semarang.

DP3A Kota Semarang selaku pihak yang membuat kebijakan terkait pencegahan KDRT. PPT Seruni selaku lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang berperan sebagai fasilitator yang menangani perempuan korban KDRT. Sementara DP3A Kota Semarang, PPT Seruni Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang, Dinas Sosial Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang sebagai implementor program, serta pihak swasta (APSAI Kota Semarang) sebagai akselerator yang

berperan dalam mendukung program Pencegahan KDRT. Setiap stakeholder memang memiliki peranan mereka masing-masing, namun mereka juga memiliki perbedaan kepentingan dalam keterlibatan program tersebut. Perbedaan kepentingan ini turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Meskipun telah terjadi pembagian peran pada pelaksanaan program pencegahan KDRT di Kota Semarang, namun hal tersebut tidak menjamin pelaksanaan program akan berhasil. Hal ini terlihat dari indikasi belum optimalnya peran stakeholder berupa pelaksanaan peran DP3A Semarang sebagai *policy creator* dan koordinator. DP3A Semarang berperan dalam membuat dan mengambil kebijakan terkait pencegahan KDRT, namun pelaksanaan peran tersebut belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus KDRT di Kota Semarang yaitu sebesar 421 kasus (DP3A, 2020) serta menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Semarang.

DP3A Kota Semarang dan PPT Seruni juga berperan sebagai koordinator dengan berbagai stakeholder terkait pencegahan KDRT di Kota Semarang, namun pelaksanaan peran stakeholder tersebut belum dapat berjalan optimal hal ini dapat diketahui dari penelitian (Mahartiwi, 2018) yang menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan DP3A dan PPT Seruni masih kurang guna mendorong komitmen pelaksana program. Pelaksana yang dimaksud adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai stakeholder pelaksana kebijakan.

Indikasi belum optimalnya peran juga dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian berupa 1) kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota yang tergabung dalam PPT Seruni (Wati, 2018) 2) Bentuk koordinasi diantara stakeholder yang rumit bahkan cenderung tidak jelas (Putrihartiwi, 2017) dan Utami (2016) 3) tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga yang menangani pencegahan KDRT (Putrihartiwi, 2017) dan (Utami, 2016) 4) kurang meratanya sosialisasi oleh stakeholder DP3A Kota Semarang terhadap masyarakat sehingga belum semua masyarakat mengetahui tentang perda perlindungan perempuan (Mahartiwi, 2018) 5) masih tingginya kasus KDRT (Data KDRT oleh DP3A Kota Semarang, 2016-2020) 6)meningkatnya rasio KDRT (Data RKPD Kota Semarang, 2020) 7) meningkatnya kekerasan pada perempuan (Data Angka Kekerasan Terhadap Perempuan oleh DP3A Kota Semarang, 2015-2018).

Berdasarkan identifikasi permasalahan itu dapat diketahui bahwa gap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program adalah belum optimalnya peran stakeholder dalam pelaksanaan program yang dibuktikan oleh hasil penelitian dari (Wati, 2018), (Putrihartiwi, 2017), (Utami, 2016) dan (Satriani, 2017) yang didukung dengan data masih tingginya kasus KDRT, data meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2015-2018, data tingginya rasio KDRT. Berdasarkan gap permasalahan tersebut membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘’ PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG’’**.

1.2 Identifikasi Masalah

a) Kurangnya komitmen & komunikasi antar anggota stakeholder yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni (Wati, 2018)

b) Bentuk koordinasi diantara stakeholder yang rumit bahkan cenderung tidak jelas (Putrihartiwi, 2017) dan (Utami, 2016)

c) Ketimpangan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menangani pencegahan KDRT (Putrihartiwi, 2017) dan (Utami, 2016)

d) Kurang meratanya sosialisasi oleh stakeholder DP3A Kota Semarang terhadap masyarakat sehingga belum semua masyarakat mengetahui tentang perda perlindungan perempuan (Mahartiwi, 2018)

e) Masih tingginya KDRT (Berdasarkan Data KDRT di Kota Semarang, DPPPA Kota Semarang 2016-2020)

f) Meningkatnya rasio KDRT (Berdasarkan Data Rasio KDRT, RKPD Kota Semarang Tahun 2020)

g) Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan (Berdasarkan Data Angka Kekerasan Pada Perempuan, DPPPA Kota Semarang Tahun 2015-2018)

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana peran stakeholder dalam program Pencegahan KDRT di Kota Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi dan menganalisis peran setiap stakeholder dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritas

1) Dapat memberikan sumbangan pikiran terkait peran stakeholder dalam program Pencegahan KDRT di Kota Semarang sehingga dapat berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

2) Penelitian ini diharapkan dapat membagikan pengetahuan mengenai peran stakeholder dalam program Pencegahan KDRT di Kota Semarang dan menjadi referensi tulisan bagi mahasiswa, universitas dan lembaga terkait.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna terhadap :

a. DP3A Kota Semarang terkait koloborasi stakeholder dalam program Pencegahan KDRT di Semarang

b. Pemerintah Kota Semarang mengenai peran stakeholder dalam program Pencegahan KDRT di Semarang

c. PPT Seruni Semarang, terkait peran stakeholder dalam program Pencegahan KDRT di Semarang

d. Warga Kota Semarang, mengenai pengetahuan pentingnya Pencegahan KDRT.

e. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan memberikan kesadaran tentang pentingnya pentingnya Pencegahan KDRT.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

1) Jurnal mengenai peran PPT Seruni Semarang guna memberikan keamanan hukum pada anak korban KDRT menggunakan nilai keadilan oleh Ida Musofiana (2017) mempunyai tujuan menganalisis peran PPT Seruni Semarang. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa anak yang mengalami kekerasan diurus oleh kepolisian Unit PPA, tetapi polisi juga bisa memindahkan anak korban ke Rumah Sakit atau PPT Seruni Semarang bagi yang bertempat tinggal di Semarang. Sementara untuk anak yang mengalami gangguan psikologis dapat ditujuk ke rumah aman.

Perbedaan penelitian oleh Ida Musofiana (2017) dengan penelitian oleh penulis yaitu pada penelitian Ida Musofiana (2017) hanya membahas fenomena kekerasan yang terfokus pada anak di Kota Semarang, sementara penelitian oleh penulis fenomena terfokus peran stakeholder

pada program pencegahan KDRT. Metode penelitian yang digunakan oleh Ida Musofiana (2017) menggunakan metode Yuridis Sosiologis sementara penelitian penulis menggunakan meode penelitian kualitatif deskriptif, namun demikian terdapat beberapa kesamaan penelitian oleh penulis dengan Ida Musofiana (2017) yaitu sama-sama membahas mengenai anak korban kekerasan di Kota Semerang, bedanya Ida Musofiana (2017) studi kasus pada PPT Seruni, peneliti di Kota Semarang secara umum melalui beberapa kesamaan ini, penulis dapat memadukan hasil penelitian oleh Ida Musofiana (2017) yang telah dilakukan pada PPT Seruni dengan penelitian penulis.

2) Jurnal mengenai‘’Community stakeholders’ views on reducing violence against women in Pakistan’ oleh Tazeen Saeed Ali et. all (2020) bertujuan untuk memahami stakeholder untuk mengurangi korban kekerasan terhadap perempuan dan menggali strategi yang paling mungkin dilakukan oleh komunitas yang ada di Pakistan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga masalah utama dalam anggota komunitas dan stakeholder dalam menyikapi VAW (Violance Against Women): a) presepsi komunitas mengenai VAW b) akibat dari VAW c) bannyaknya suara mengenai strategi untuk mengurangi VAW. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu fenomena penelitian penulis mengenai program pencegahan KDRT di Semarang sedangkan penelitian oleh Tazeen Saeed Ali et.al mengenai strategi untuk mengurangi korban kekerasan terhadap

perempuan di Pakitan meskipun begitu penelitian penulis dengan penelitian oleh Tazeen Saeed Ali et.al memiliki kesamaan dalam hal pembahasan stakeholder dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian oleh Ali et.all dapat dijadikan referensi dalam memperkaya hasil penelitian penulis sehingga penelitian oleh Ali et.all berfungsi untuk memadukan hasil penelitian penulis dan tidak bersebrangan dengan penelitian penulis.

3) Jurnal mengenai‘’Community Stakeholders’ Perspective on Intimate Patner Violance during Pregnancy – A Qualitative Study from Ethiopia’’oleh Gashaw et.all bertujuan menggali perspektif stakeholder komunitas terkait IPV (Intimate Patner Violance) dalam kehamilan di Jimma, Ethiopia, and jika dibutuhkan menciptakan ilmu pengetahuan bagi dasar intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara korban IPV dan pelaku kekerasan adalah solusi yang paling direkomendasikan oleh hampir semua responden. Adanya keterbatasan kepedulian terhadap dampak yang merugikan dari IPV dalam kehamilan perempuan dan janin.

Perbedaan penelitian dengan penulis, meskipun penelitian oleh Gashaw et.all memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian penulis yaitu mengenai komunitas stakeholder dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan, namun terdapat perbedaan penelitian dengan penulis

mengenai fenomena penelitian yang dibahas yaitu penelitian penulis mengenai peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT di Semarang sementara penelitian oleh Gashaw et.all membahas mengenai prespektif IPV (*Intimate Patner Violance*) selama kehamilan sebuah pembelajaran kualitatif dari Ethiopia. Hasil penelitian oleh Gashaw et.all dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam memperkaya hasil tulisan penulis sehingga berfungsi memadukan hasil penelitian penulis serta tidak berseberangan dengan hasil penelitian oleh Gashaw et.all.

4) Jurnal mengenai pandangan umum kekerasan wanita & anak, *oleh Bernice Roberts Kennedy* (2017) bertujuan mengidentifikasi tindakan kekerasan yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak diseluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus kekerasan, terdapat banyak faktor yang berkontribusi menjadi penyebab dari kekerasan. Bagaimanapun, ketimpangan gender, norma sosial terkait maskulinitas, dan ketimpangan ekonomi telah berdampak pada kekerasan perempuan dan anak dalam masyarakat kita. Upaya peran dibutuhkan dari advokasi secara mendunia untuk melindungi perempuan dan anak. Pendekatan global dibutuhkan dalam sistem kesehatan untuk memainkan bagian dalam multisektor respon terhadap kekerasan perempuan dalam mendukung hak asasi perempuan dan anak.

Perbedaan penelitian oleh Kennedy (2017) dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian oleh penulis pada peran stakeholder pada program pencegahan KDRT di Semarang, sementara penelitian oleh Kennedy (2017) fokus pada perspektif global dalam kekerasan perempuan dan anak. Meskipun berbeda tetapi hasil penelitian oleh Kennedy mengenai perlunya advokasi dalam perlindungan perempuan dan anak dapat menjadi bahan referensi penulis dalam memperkaya isi tulisan penulis sehingga penelitian oleh Kennedy (2017) dapat dipadukan dengan penelitian penulis serta tidak bersebrangan.

5) Jurnal mengenai KDRT di Flores Timur oleh Susanty & Julqurniati (2019) bertujuan mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk KDRT, hal-hal apa saja yang mempengaruhi KDRT, dan upaya pencegahan KDRT yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Hasil peneltian menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang terjadi di masyarakat ada 2 yaitu kekerasan fisik & penelantaran rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi KDRT anatara lain cemburu & ketidaksetiaan, keuangan, budaya, serta kepadulian sosial, sedangkan upaya Pencegahan KDRT antara lain berupa penyuluhan & perlakuan khusus pada korban kekerasan

Perbedaaan penelitian oleh Susanty dan Julqurniati (2019) dengan penelitian penulis yaitu fenomena penelitian yang diteliti oleh penulis

mengenai peran stakeholder dalam program perlindungan perempuan KDRT, lokus dari penelitian penulis berada di Kota Semarang sementara penelitian oleh Susanty dan Julqurniati (2019) berada di Flores Timur. Meskipun berbeda namun, hasil penelitian oleh Susanty dan Julqurniati (2019) mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor dan upaya Pencegahan KDRT dapat dijadikan bahan referensi oleh penulis sehingga penelitian oleh Susanty dan Julqurniati (2019) dengan penelitian penulis berfungsi untuk memadukan hasil peneltian agar dapat memperkaya isi penelitian penulis.

6) Jurnal mengenai peran stakeholder pada pelaksanaan kebijakan perlindungan wanita terhadap perilaku kekerasan di Semarang oleh Wati, Mei Sarah dan Kismartini yang mempunyai tujuan mengidentifikasi stakeholder & analisis peran serta faktor penghambat peran stakeholder bagi pelaksanaan perlindungan wanita di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder internal terdiri atas DP3A Semarang memiliki peran sebagai *policy creator*, fasilitator, koordinator & PPT Seruni, PPT Kecamatan, Tim Penggerak PKK Semarang berperan sebagai fasilitator, implementator & koordinator. Sementara stakeholder eksternal berperan sebagai fasilitator terdiri atas LSM , masyarakat yang peduli terhadap perempuan, dinas yang bersangkutan, rumah sakit, akademisi. Faktor yang menghambat pada penananganan kasus kekerasan perempuan antaralain rendahnya komitmen anggota yang tergabung pada PPT ,

belum adanya sumber daya manusia dan sumber daya financial, ketimpangan tugas & fungsi organisasi, struktur birokrasi rumit serta rentan bocornya data korban, aturan yang menghambat penanganan, proses untuk membuktikan kasus kekerasan sulit dilakukan & budaya patriarki yang kental.

Perbedaan penelitian oleh Wati dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT, meskipun berbeda namun hasil penelitian oleh Wati mengenai identifikasi peran stakeholder dapat menjadi referensi dalam memperkaya isi tulisan penulis. Sehingga penelitian tersebut berfungsi untuk memadukan hasil penelitian penulis dan tidak bersebrangan dengan penelitian penulis.

7) Jurnal mengenai kekerasan terhadap wanita & perceraian pada pandangan pemberdayaan wanita oleh Galistya (2019) bertujuan menggambarkan karateristik situasi pembinaan gender, kekerasan pada wanita & perceraian yang merupakan akibat dari kekerasan sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan & kesehatan wanita, serta mempertahankan keutuhan keluarga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fenomena pembinaan wanita, yaitu keikutsertaan wanita untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga, pengendalian wanita pada penghasilan wanita mempunyai hubungan terhadap penolakan wanita pada alasan yang

membolehkan pemukulan suami kepada istri. Secara global, tingginya keikutsertaan & pengendalian yang oleh perempuan, maka wanita semakin menolak pada semua alasan yang membolehkan pemukulan suami pada istri. Hal ini memperlihatkan kedepan hal ini, bisa meminimalisir KDRT.

Perbedaan penelitian oleh Galistya (2019) dengan penelitian oleh penulis yaitu fokus peneltian oleh Galistya (2019) berfokus pada kekerasan pada wanita dan perceraian melalui pandangan pemberdayaan wanita, sementara penelitian oleh penulis fokus pada peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT. Hasil penelitian Galistya (2019) mengenai keikutsertaan wanita pada pengambilan kebijakan rumah tangga dan pengendalian wanita yang mempunyai keterkaitan untuk tidak membenarkan kekerasan oleh suami terhadap istri dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam memperkaya isi tulisan penulis, hasil penelitian tersebut dapat dipadukan dengan konten penulis.

8) Jurnal mengenai peran & koordinasi stakeholder bagi berkembanganya wilayah Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar‘’ oleh Mahfud dkk. Bertujuan mengetahui peran dan koordinasi stakeholder pada perluasan wilayah Minapolitan di Nglegok, Kabupaten Blitar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kurangnya program & pendananan dari sebagian stakeholder sementara dari segi koordinasi

dengan stakeholder lain dilaksanakan secara intern & ekstern berlangsung dinamis.

Perbedaan penelitian oleh Mahfud dkk. dengan penelitian oleh penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT sementara penelitian oleh Mahfud dkk. berfokus pada fenomena perluasan wilayah Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, namun demikian hasil penelitian oleh Mahfud dkk. mengenai peran dan koordinasi stakeholder dapat dipadukan dengan penelitian penulis guna memperkaya isi tulisan penulis.

9) Jurnal mengenai peran pemerintah pada pelaksanaan program CSR oleh Darwis, Rudi Saprudin dkk. Bertujuan menggambarkan kontribusi pemerintah sebagai stakeholder dalam melaksanakan program CSR. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah banyak melaksanakan sebagai pendukung untuk melakukan program CSR melalui regulasi maupun fasilitas. Perusahaan juga berusaha dalam mendukung tercapainya tujuan program CSR.

Perbedaan hasil penelitian oleh Darwis dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada peran stakeholder dalam program pencgahan KDRT sementara penelitian oleh Darwis lebih berfokus pada peran pemerintah dalam peran stakeholder pada pelaksanaan program CSR, namun terdapat kesamaan dalam hal pembahasan mengenai peran

stakeholders sehingga hasil penelitian mengenai peranan pemerintah dalam peran stakeholder dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memperkaya tulisan penulis. Penelitian oleh Darwis berfungsi memadukan hasil penelitian penulis dan tidak bersebrangan.

10) Jurnal mengenai efektivitas program Wited pada pendaftaran perempuan dalam pendidikan & pelatihan teknik serta kejuruan oleh Najoli (2019) bertujuan menganalisis efektivitas program WITED pada peranan perempuan dalam pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam program TVET dimana stereotip budaya,kurangnya model panutan,faktor sosial budaya menjadi halangan utama bagi perempuan dalam berkembang.

Perbedaan penelitian oleh Najoli (2019) dengan penelitian penulis penelitian oleh Najoli (2019), menganalisis mengenai Efektivitas program WITED (*Women in Technical Education and Development*) sementara penelitian penulis mengenai peran stakeholder pada pencegahan KDRT di Semarang, hasil penelitian oleh Najoli (2019) mengenai upaya program WITED dalam mengedukasi dan memberdayakan perempuan dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam memperkaya isi tulisan dan dapat dipadukan dengan penelitian penulis dalam upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui program pelatihan dan pemberdayaan terhadap perempuan

1.6.2 Administrasi Publik

Para ahli administrasi publik berusaha untuk memberikan definisi yang tepat mengenai Administrasi Publik, namun karena luasnya makna dari Administrasi Publik maka tidak ada definisi yang benar-benar tepat menggambarkan makna dari Administrasi Publik. Definisi mengenai Administrasi Publik dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus dalam (Syafiie, 2006) yang mendefinsikan Administrasi Publik adalah pelaksanaan kebijakan publik yang sudah diputuskan oleh organisasi perwakilan politik. administrasi publik juga bisa dimaknai sebagai koordinasi upaya perorangan & kelompok guna pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal itu termasuk pekerjaan pemerintah yang sehari-hari dilakukan. Secara komprehensif, Administrasi Publik adalah suatu proses yang bersangkutan pada pelaksanaan kebijakan publik, pengarahan ketrampilan & teknik yang tak terhingga jumlahnya, mengarahkan tujuan pada upaya sebagian orang.

Menurut Felix A Nigro dan Lloyd G.Nigro dalam (Syafiie, 2006) memberikan definisi mengenai Administrasi Publik yaitu: a) Suatu kerja sama kelompok pada lingkup pemerintahan b) Terdiri atas 3 cabang eksekutif, legislatif & yudikatif dan ikatan di dalamnya c) Memiliki kontribusi penting bagi rumusan kebijakan publik & merupakan bagian dari proses politik d) Erat berhubungan oleh berbagai jenis sektor swasta & individu untuk memberikan pelayanan publik.

Administrasi Publik pada sebagian bidang berbeda pada peletakan definisi dengan administrasi perseorangan. Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo (1982) menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan administrasi dari negara sebagai lembaga & administrasi yang mengupayakan tercapainya tujuan kenegaran. Secara khusus, administrasi publik mempunyai empat institusi atau lembaga strategis. Pertama, kebijakan yang merupakan tugas pokok dari setiap organisasi publik-fungsi. Kedua, organisasi-organisasi publik, yang menyelanggarakan fungsi-fungsi administrasi publik-perangkat (keras). Ketiga, lembaga yang mempersiapkan para administrasi publik penyuplai nilai dan kompetensi. Keempat, lembaga sistem atau mekanisme administrasi publik yang merupakan piranti lunak dari organisasi publik proses. Keempatnya dapat digambarkan pada bagan 1 Empat Institusi Strategis Administrasi Publik.

Bagan 1 : Empat Institusi Strategis Administrasi Publik

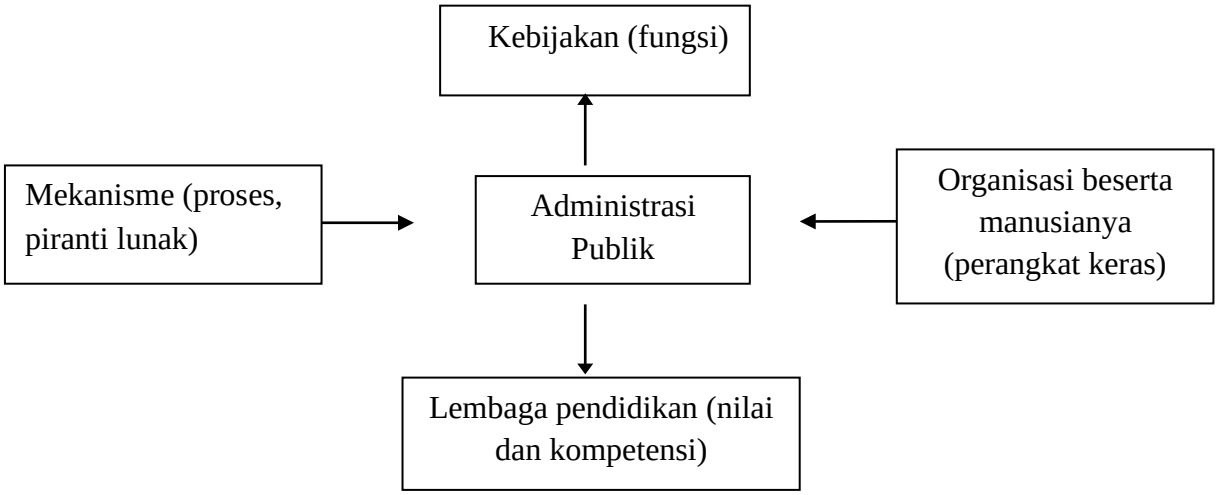

Sumber : Agustino (2016)

Berdasarkan definisi Administrasi Publik dari para ahli yaitu Pfiffner dan Presthus dalam (Syafiie, 2006), Felix A Nigro dan Lloyd G.Nigro dalam (Syafiie, 2006), Prajudi Atmosudirdjo (1982), Thomas S Khun (1970) dan Nicholas Henry dalam (Syafiie, 2006) mengenai paradigma Administrasi Publik dapat diketahui bahwa Administrasi Publik merupakan serangkaian koordinasi upaya individu & kelompok dalam melakukan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan saling berkaitan erat antara negara & swasta saat bekerjasama untuk melakukan pelayanan publik. Keterkaitan Administrasi Publik dengan penelitian penulis yaitu dalam Administrasi Publik merupakan pelaksanaan kebijakan program pemerintah, penelitian penulis membahas mengenai pelaksanaan peran

stakeholder dalam menjalankan pencegahan KDRT di Semarang. Antara teori Administrasi Publik dengan pelaksanaan peran stakeholder sangat berkaitan erat kebijakan publik yang merupakan lingkup teori dalam Ilmu Administasi Publik.

1.6.3 Kebijakan Publik

Berdasarkan hasil penelitian dari Putri (2017) hubungan antar stakeholder dalam proses kebijakan publik membuktikan bahwa dalam pengambilan kebijakan tidak dapat terlepas dari stakeholder dalam kebijakan publik itu sendiri. Sementara itu, menurut Thomas R.Dye (1981) kebijakan publik merupakan segala upaya yang dilaksanakan pemerintah, apakah melakukan upaya itu atau tidak melaksanakan (membiarkan) hal itu terjadi.

Menurut RC. Chandler dan JC.Plano (1988) kebijakan umum merupakan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Willy N.Dunn dalam (Syafiie, 2006), kebijakan umum merupakan suatu rentetan keputusan yang saling berkaitan dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara terhadap semua bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintah, contohnya energi, pertahanan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sementara itu, analisis kebijakan publik merupakan tindakan yang memberikan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut William N Dunn (2013: 24) tahapan dalam kebijakan publik terdiri dari :

a) Tahap Pembuatan Agenda

Melalui tahapan ini pejabat terpilih atau stakeholder terkait kebijakan dipilih dan diangkat untuk menempatkan masalah kebijakan pada agenda kebijakan. Sebagian masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan saat merumuskan kebijakan. Tahapan ini akan menentukan masalah apa yang akan menjadi fokus pembahasan.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini masalah yang tidak masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian ditulis oleh pengambil kebijakan. Masalah yang telah didefinisikan lalu diberi solusi. Solusi berasal dari beberpa alternative pilihan yang ada. Melalui perumusan kebijakan, setiap alternatif berlomba untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diberikan solusinya. Pada tahapan ini setiap stakeholder saling bersaing untuk memberikan solusi dianggap paling baik.

c) Tahap Pengambilan Kebijakan

Berdasarkan beberapa pilihan kebijakan yang diberikan perumus kebijakan. Sebagian analisis & perkiraan akan dilakukan untuk memperoleh alternatif kebijakan sehingga akhirnya terpilih kebijakan yang akan diambil melalui dukungan sebagian besar legislatif, kesepakatan dengan pimpinan lembaga atau keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan jika tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak bermakna. Kebijakan terpilih harus dilakukan oleh bidang administrasi untuk menyalurkan sumber daya keuangan & manusia. Melalui tahap ini, semua keperluan stakeholder akan saling berlomba.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahapan ini akan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan suatu program kebijakan, untuk mengetahui sejauh mana akibat kebijakan yang dibentuk untuk hasil ditargetkan.

Berdasarkan teori William N Dunn (2013:24) mengenai tahap-tahap kebijakan publik, dalam penelitian penulis membahas mengenai peran dari berbagai stakeholder yang berhubungan dengan program pencegahan KDRT di Semarang. Selama menjalankan perannya sebagai 1) *policy creator* 2) koordinator 3) fasilitator 4) implementor dan 5) akselerator program memiliki keterkaitan dengan teori William N Dunn (2013:24) yaitu pada teori tahap penyusunan kebijakan, formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan dengan peran stakeholder sebagai *policy creator* (pembuat kebijakan). Melalui pelaksanaan perannya sebagai pembuat kebijakan, para pembuat kebijakan akan melalui tahapan 1) penyusunan kebijakan 2) formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan sebelum akhirnya diimplementasikan sebagai produk kebijakan publik yang siap dilaksanakan.

Teori Dunn (2013:24) juga memiliki keterkaitan antara pelaksanaan peran stakeholder sebagai koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator dengan teori tahapan implementasi kebijakan William N Dunn (2013:24) karena selama menjalankan peran sebagai koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator stakeholder akan melalui tahapan implementasi kebijakan untuk dapat melaksanakan perannya. Antara peran sebagai koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator akan saling berkaitan dengan tahapan implementasi kebijakan oleh Dunn (2013:24). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui dalam menjalankan perannya sebagai 1) *policy creator* 2) koordinator 3) fasilitator 4) implementor dan 5) akselerator para stakeholder terkait program akan melalui tahapan kebijakan menurut William N Dunn (2013:24). Selain itu hasil penelitian dari Putri (2017) juga membuktikan bahwa peran stakeholder tidak dapat terlepas dari proses pengambilan kebijakan, itu artinya kebijakan publik dengan peran stakeholder dalam proses kebijakan memiliki hubungan yang sangat erat.

1.6.4 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Herabudin, 2016) menjelaskan implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan aparatur negara, sektor pemerintah dan swasta yang ditunjukkan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2007) menyatakan bahwa inti dari implementasi adalah mengerti yang terjadi setelah program dijalankan & dirumuskan.

Menurut Barret (2004) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan menerjemahkan kebijakan menjadi aksi. Sementara menurut Joko Widodo (2010) mendefinisikan implementasi merupakan proses yang berhubungan dengan berbagai sumber diantaranya SDM, uang dan ketrampilan organisasional yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta. Sehingga secara sederhana implementasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai tindakan dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk meraih tujuan kebijakan.

Menurut Ripley & Franklin (1986) syarat penentuan berhasilnya implementasi kebijakan terdiri atas 3 hal yakni : ketaatan birokrasi terhadap birokrasi yang lebih tinggi sesuai regulasi yang berlaku, terdapat kemudahan rutinitas dan hilangnya masalah, pelaksanaan dan akibat yang diinginkan berdasarkan program yang sudah direncanakan.

Sementara menurut Quade (1984) menjelaskan terdapat 4 hal yang semestinya diamati pada analisis implementasi kebijakan publik, yakni :

I. Kebijakan yang diinginkan yaitu bentuk hubungan yang diinginkan supaya pihak yang mengesahkan kebijakan berupaya mencapainya.

II. Kelompok sasaran yaitu pelaku yang dinilai mampu mengambil bentuk hubungan baru dengan kebijakan & pelaku yang semestinya berubah guna mencukupi kebutuhan.

III. Organisasi pelaksana yaitu satuan birokrasi publik yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

IV. Faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan yang menentukan hasil implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam (Herabudin, 2016), Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2007), Barret (2004), Joko Widodo (2010), Ripley & Franklin (1986) dan Quade (1984) mengenai implementasi kebijakan dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu tindakan pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh pejabat pemerintah, swasta dan pemerintah atau stakeholder yang terkait dengan kebijakan pemerintah.

Guna melaksanakan kebijakan tersebut menurut Ripley & Franklin (1986) dan Quade (1984) hal yang harus diperhatikaan adalah aspek kepatuhan birokrasi, kelancaran rutinitas, pelaksanaan dan dampak yang dikehandaki dari program kebijakan, kebijakan impian, kelompok target, organisasi dan faktor lingkungan yang saling berkaitan selama proses pelaksanaan program kebijakan. Teori dari para ahli tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pelaksanaan peran stakeholder sebagai koordinator, faslitator,

implementor dan akselerator dari para stakeholder dalam mengimplementasikan program pencegahan KDRT di Semarang.

1.6.5 Peran Stakeholder

Penelitian ini akan menggunakan peran stakeholder sebagai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis program Pencegahan KDRT di Semarang. Berdasarkan hasil penelitian Putri (2017) stakeholder secara umum dapat dimaknai sebagai pihak-pihak yang terkait, memiliki perhatian & kepentingan dengan suatu program atau kegiatan. Sementara itu, Schrage (dalam Harley dan Bisman, 2010) berpendapat peran merupakan usaha bersatunya berbagai pihak guna meraih tujuan yang sama.

Pada bidang administrasi publik konsep peran dikembangkan oleh Ansell dan Gash (dalam Harmawan, 2017) ke dalam konsep yang lebih dikenal dengan sebutan ‘’ *collaboration governance’’* yaitu suatu proses diambilnya kebijakan & proses pengelolaan dengan mengikutsertakan orang secara konstruktif antaralain organisasi publik, pihak pemerintah, sektor umum dan pribadi dalam rangka meraih tujuan umum yang ingin dicapai, sedangkan menurut Holzer et.al. (2012) mendefinisikan bahwa kolaborasi pemerintah merupakan situasi saat pemerintah dan swasta berusaha meraih tujuan bersama bagi masyarakat.

Peran dapat dilakukan apabila terdapat pihak-pihak yang saling bekerjasama untuk melaksanakan program. Pihak tersebut antaralain pihak

pemerintah, NGO (lembaga masyarakat) & swasta. Menurut Ndraha (2005:57) a) pihak pemerintah merupakan seluruh alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai alat guna meraih tujuan negara. b) Pihak NGO (lembaga masyarakat) merupakan pihak yang berasal dari kalangan lembaga masyarakat non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk membantu pelaksanaan program c) pihak swasta merupakan stakeholder yang berasal dari kalangan bisnis yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk membantu mempercepat pelaksanaan program.

Masing-masing stakeholder memiliki peranan dan tanggung jawab yang berbeda. Peran stakeholder sendiri diartikan sebagai keterlibatan stakeholder dalam suatu program (Nugroho, 2014). Menurut Nugroho (2014) membagi peranan dan tanggung jawab stakeholder menjadi beberapa bagian yaitu :

1. *Policy Creator* merupakan stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Sejalan dengan pemikiran Nugroho (2014) menurut Agustino (2016) terdapat beberapa unsur dalam pembuatan atau pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh *policy creator* yaitu :

    a. *Policy creator* diberikan suatu permasalahan tertentu yang bisa dibedakan antara suatu masalah dengan masalah lain atau setidaknya dapat dipertimbangkan secara mendalam bahwa

masalah yang hendak diselesaikan adalah masalah yang penting untuk diselesaikan jika dibandingkan dengan masalah yang lainnya. Identifikasi masalah adalah hal yang sangat penting.

b. Menetapkan dan menyusun tujuan, nilai dan sasaran yang menjadi pedoman pengambil keputusan setelah itu pemeringkatan menurut kepentingan tujuan disusun dalam rangka mencapai tujuan yang rasional.

c. Mengidentifikasi semua alternatif keputusan, termasuk meneliti secara seksama bermacam-macam alternative yang berhubungan dengan masalah publik.

d. Melakukan prediksi atas konsekuensi dari segenap alternative keputusan yang ditawarkan baik dari segi biaya maupun manfaatnya.

e.Masing-masing alternatif dan akibat yang menyertainya dibandingkan dengan alternatif lainnya.

f. Pembuat keputusan memilih alternatif yang terbaik.

2. Koordinator yaitu stakeholder yang memiliki peran sebagai koordinator stakeholder lain dan terlibat dalam program tersebut. Sesuai dengan pemikiran Nugroho (2014) menurut Handayaningrat

(1984) terdapat dua bentuk koordinasi yang akan dilakukan oleh koordinator yaitu :

a. Koordinasi intern

Koordinasi vertical yaitu koordinasi yang terjadi antar koordinator mempunyai hubungan hierarkis dengan struktural.

Koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang terjadi dimana hubungan antar koordinator mempunyai posisi setara

Koordinasi diagonal yaitu koordinasi yang terjalin antar koordinator yang memiliki posisi yang lebih atas daripada yang dikoordinasikan tapi tidak diposisi satu komando.

b. Koordinasi ekstern

Koordinasi ekstern secra horizontal yaitu koordinasi yang mempunyai posisi setara antara koordinator dengan yang dikoordinasikan.

Koordinasi ekstern diagonal yaitu koordinasi dimana antara koordinator dengan yang dikoordinasikan memiliki posisi yang lebih atas daripada yang dikoordinasikan tapi beda komando.

3. Fasilitator yaitu stakeholder yang memiliki peran untuk memfasilitasi dan memenuhi hal yang diperlukan oleh kelompok di dalam program tersebut. Sejalan dengan pemikiran Nugroho (2014) menurut Jumrana

dan Tawulo (2015) dalam menjalankan tanggung jawabnya fasilitator bertugas untuk:

(1)Menerapkan aturan main dalam daerah dampingan,

(2)Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh petunjuk teknis,

(3) Menangani masalah, pelatihan, dan penguatan kelompok.

4. Implementor yakni stakeholder yang mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan termasuk kelompok sasaran program yang diselenggarakan. Sejalan dengan pemikiran Nugroho (2014). Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh implementor selama melaksanakan implementasi kebijakan yaitu :

   a) Komunikasi, yaitu berhasilnya pelaksanaan kebijakan mengahruskan supaya implementor mengerti tindakan yang semestinya dilaksanakan, pihak mana yang dijadikan tujuan & target kebijakan harus ditujukan terhadap kelompok target sehingga akan meminimasalisir kesalahan pelaksanaan.

   b) Sumberdaya walaupun isi kebijakan sudah dikoordinasikan dengan jelas & konsisten, namun jika pelaksana belum mempunyai sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan belum bisa

berlangsung efektif. Sumber daya itu bisa berupa SDM & dana misalnya kompetensi implementor & pendanaan.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel

5. Akselerator merupakan stakeholder yang mempunyai peran untuk mempercepat & memberikan kontribusi supaya program bisa berjalan lancar atau lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Lebih

lanjut Nugroho (2014) menjelaskan bahwa seorang akselerator diharapkan dapat memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi dalam pelaksanaan program. Tugas utama akselerator adalah mendukung dan mempercepat pelaksanaan program sesuai dengan tujuan. Misalnya dengan memberikan dana tambahan atau sarana dan prasarana yang mendukung percepatan pelaksanaan program.

Peran stakeholder dilakukan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan, tanpa adanya peran tujuan tersebut akan sulit diraih sehingga diperlukan adanya kerjasama antar aktor pemerintah, masyarakat dan pihak non pemerintah. Menurut (Fendt, 2010) terdapat beberapa alasan mengapa suatu organisasi melakukan peran yaitu : a) Organisasi membutuhkan peran karena tidak dapat menyelesaikan suatu tugas tertentu tanpa bantuan dari pihak lain b) Melalui peran & manfaat yang diperoleh akan lebih besar daripada bekerja sendiri c) Melalui peran organisasi dapat meminimasilir biaya yang dikeluarkan untuk operasional sehingga lebih murah

Menurut Deseve (dalam Sudarmo, 2011) dalam melakukan peran ada beberapa hal yang menjadi kriteria keberhasilan peran antaralain sebagai berikut:

a) Tipe struktur jaringannya, berkaitan dengan keterkaitan antar elemen yang diharapkan dapat menyatu bersama, menggambarkan aspek fisik & jaringan yang diurus.

b) Komitmen pada tujuan, mengarah kepada alasan atas keberadaan sebuah jaringan, mengapa jaringan tersebut harus ada yang alasannya adalah karena perhatian & komitmen untuk meraih tujuan positif

c) Adanya rasa saling percaya di anatara pelaku yang ada dalam jaringan, rasa percaya ini didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, kepercayaan di mana para partisipan percaya pada informasi-informasi atau upaya stakeholder dalam suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama

d) *Governance*, ditandai dengan kepastian *governance* atau kejelasan dalam tata kelola

e) Akses terhadap kekuasan, berkaitan dengan tersedianya aturan, SOP yang jelas & dapat diterima luas

f) Pembagian akuntabilitas / tanggung jawab, berkaitan dengan pengelolaan bersama stakeholder & berbagai pembuatan keputusan pada seluruh anggota sehingga berbagai tanggung jawab bisa dilaksanakan guna mencapai hasil yang diinginkan apabila tidak terdapat keterlibatan anggota dalam penentuan tujuan jaringan & tidak ada keinginan membawa sumber

daya dan otoritas dalam jaringan maka jaringan dapat mengalami kegagalan

g) Berbagai informasi berkaitan dengan kemudahan akses, perlindungan *privacy &* terbatasnya akses bagi non anggota dapat diterima seluruh pihak

h) Akses kepada sumberdaya terkait adanya sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lain guna meraih tujuan.

Berdasarkan teori dari Schrage (dalam Harley dan Bisman, 2010), Ansell dan Gash (dalam Harmawan, 2017), Holzer et.al. (2012), (Djumara, 2008), Yosevita (2015), (Fendt, 2010), (Ardianto, 2008), (Nugroho, 2014), Agustino (2016), Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), Jumrana dan Tawulo (2015) dan Deseve (dalam Sudarmo, 2011) mengenai peran stakeholder dapat diketahui bahwa peran stakeholder merupakan pelaksanaan peran dari berbagai stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program dengan berbagai kriteria tertentu untuk menilai kerberhasilan pelaksanaan peran stakeholder. Teori itu juga didukung penelitian dari Putri (2017) yang menyatakan bahwa secara umum stakeholder dapat dimaknai sebagai pihak-pihak yang terkait, memiliki perhatian & kepentingan dengan suatu program atau kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran stakeholder merupakan bentuk pelaksaan peran stakeholder yang terkait dan memiliki kepentingan dengan program.

Selama menjalankan perannya tersebut terdapat pembagian peran antar stakeholder sebagai 1) *policy creator* 2) koordinator 3) faslitator 4) implementor dan akselerator program guna mempermudah pembagian peran dari masing-masing stakeholder yang terlibat pada pelaksanaan program.

1.6.6 Program Pencegahan KDRT di Semarang

Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang diatur dalam Perda Semarang No. 5 Tahun 2016 mengenai PPA dari perilaku kekerasan dijelaskan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah usaha langsung yang dilaksanakan pemerintah daerah & masyarakat guna mencegah tindak kekerasan terhadap wanita.

Kekerasan pada wanita merupakan setiap perilaku didasarkan bedanya jenis kelamin yang berdampak kesulitan & penderitaan wanita baik fisik, seksual & psikologis, ancaman serta pembatasan kebebasan dengan tidak adil baik publik maupun privat. Korban kekerasan merupakan wanita & anak yang mendapatkan perlakukan buruk, kerugian keuangan & mendapatkan pembiaran & pengambilan hak dasarnya.

Berdasarkan pasal 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT dijelaskan bahwa semua peilaku terhadap seseorang khususnya wanita & anak yang meyebabkan kesulitan & penderitaan baik fisik, seksual, psikologis & pembiaran dalam rumah tangga termasuk diantaranya melakukan perbuatan

memaksa & merampas kebebasan yang menentang hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tujuan program perlindungan perempuan & anak termasuk diantaranya pencegahan KDRT untuk melakukan pencegahan, memfasilitasi & mengurus korban kekerasan untuk memperoleh pelayanan sesuai permasalahan. Tanggung jawab untuk melakukan perlindungan perempuan & anak termasuk pencegahan KDRT adalah kewajiban pemerintah, masyarakat dan swasta.

1.6.7 Keranga Berpikir Teoritis

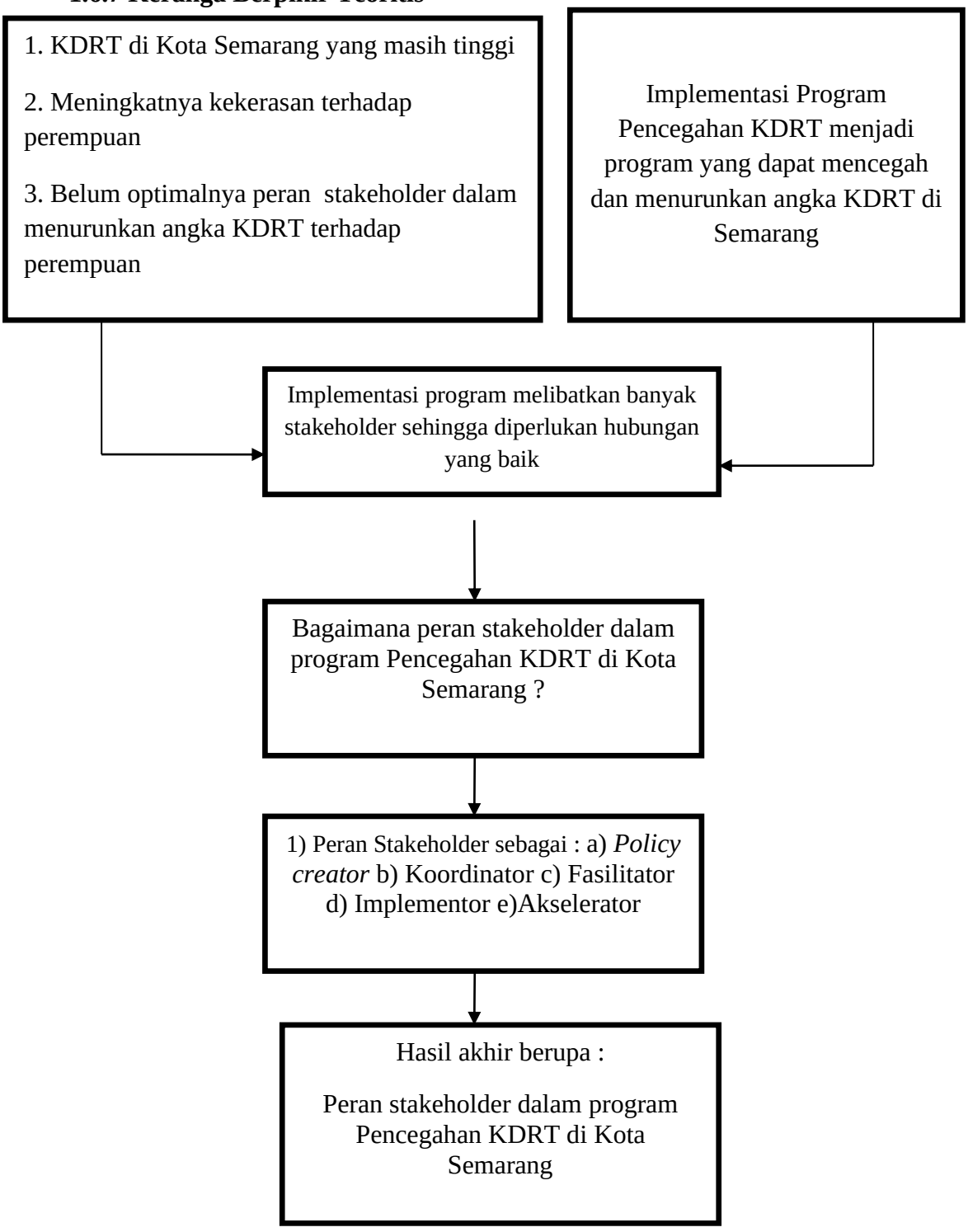

1.7 Operasionalisasi Konsep

Mengidentifikasi dan Menganalisis Peran Stakeholder

Operasionalisasi konsep pada penelitian ini menggunakan konsep peran stakeholder oleh (Nugroho, 2014). Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang akan diteliti. Fenomena merupakan gejala atau peristiwa yang bisa dilihat dalam kehidupan. Fenomena yang akan diteliti lebih memfokuskan pada peran yang dilaksanakan setiap stakeholder dalam program pencegahan KDRT di Semarang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder yang terlibat.

Pada penelitian ini setiap stakeholder akan diidentifikasikan menjadi :

a. Stakeholder pemerintah adalah stakeholder yang berasal dari kalangan pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program berdasarkan peraturan yang berlaku. Stakeholder ini terdiri dari a) DP3A Kota Semarang b) PPT Seruni c) Dinas Pendidikan Semarang d) Dinas Sosial Semarang.

b. Stakeholder NGO (Lembaga Masyrakat) adalah stakeholder yang berasal dari kalangan lembaga masyarakat non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk membantu pelaksanaan program. Stakeholder ini terdiri dari a) Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata b) Tim Penggerak PKK Kota Semarang

c. Stakeholder swasta adalah stakeholder yang berasal dari kalangan bisnis atau swasta yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk membantu mempercepat pelaksanaan program. Stakeholder ini terdiri atas a) APSAI Kota Semarang b) Bank Mandiri Cabang Semarang.

Dalam pelaksanaannya terdapat lima peran stakeholder dalam implementasi program Pencegahan KDRT di Kota Semarang, yaitu :

1 .*Policy Creator* (DP3A Semarang)

Operasionalisasi *policy creator* adalah gambaran dan penjabaran dari proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh DP3A Semarang dalam pelaksanaan program pencegahan KDRT di Kota Semarang

2. Koordinator (DP3A Semarang dan PPT Seruni)

Operasionalisasi koordinator adalah gambaran dan penjabaran dari proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DP3A Semarang dan PPT Seruni dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam implementasi program Pencegahan KDRT di Semarang.

3. Fasilitator (PPT Seruni Semarang dan Tim Penggerak PKK Kota Semarang)

Operasionalisasi fasilitator adalah gambaran dan penjabaran peran PPT Seruni Semarang dan Tim Penggerak PKK Kota Semarang dalam memfasilitasi kelompok sasaran dalam implementasi program Pencegahan KDRT di Semarang.

4. Implementor (DP3A Semarang, PPT Seruni Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang)

Operasionalisasi implementor adalah penjabaran peran DP3A Semarang, PPT Seruni Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang dalam implementasi program pencegahan KDRT.

5. Akselerator (swasta yaitu APSAI Kota Semarang dan Bank Mandiri Cabang Semarang)

Operasionalisasi akselerator adalah gambaran peran *stakeholder* atau pihak lain yang turut membantu dalam percepatan implementasi program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan menggambarkan & menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, perilaku, kepercayaan, pandangan, pemikiran individu dan kelompok (Sukmadimata, 2007). Peneliti memakai metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran stakeholder dalam program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokus dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan penelitian mengenai bagaimana peran stakeholder program Pencegahan KDRT di Kota Semarang. Tempat-tempat tersebut secara spesifik antaralain di DP3A Semarang, PPT Seruni Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang, Dinas Pendidikan Semarang, Dinas Sosial Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, APSAI Kota Semarang & Bank Mandiri Semarang.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dimintai data & informasi yang diharapkan peneliti terkait penelitian (Fitrah, 2017). Penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel sumber data menggunakan karateristik tertentu yaitu informan menguasai masalah, memiliki data dan jawaban atas pertanyaan secara akurat (Sugiyono,2012). Menurut Spradley (dalam Yeksi Wira Hartadi:2014), syarat untuk memilih informan, supaya data yang didaptkan bisa lebih tepat yaitu 1) Subyek sudah lama & intensif beradaptasi dengan daerah penelitian, dicirikan oleh ketrampilan menyampaikan informasi secara cepat & tepat mengenai hal yang ditanyakan 2) Subyek terhubung secara penuh & aktif di lingkungan dan kegiatan target penelitian. 3) Subyek memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta

mempunyai waktu lebih untuk dimintai informasi. Berdasarkan syarat yang sudah disampaikan diatas, guna memilih informan pada penelitian ini, teknik yang dipakai melalui *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara terencana berdasarkan syarat tersebut. Ciri informan yang dipakai anataralain :

A. Stakeholder Pemerintah informan yang diambil adalah sebagai berikut :

a) Kepala DP3A Kota Semarang atau perwakilan

b) Ketua Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni atau perwakilan

c) Ketua Dinas Pendidikan Kota Semarang atau perwakilan

d) Ketua Dinas Sosial Kota Semarang atau perwakilan

B. Stakeholder NGO (Lembaga Masyarakat) informan yang diambil adalah sebagai berikut :

a) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang atau perwakilan

b) Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata

C. Stakeholder Swasta Informan yang diambil adalah sebagai berikut :

a) Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) KotaSemarang atau perwakilan

b) Kepala Cabang Bank Mandiri Semarang atau perwakilan

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berarti data yang dihimpun peneliti berupa kata - kata tertulis, teks, gambar & tidak berbentuk angka.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu :

1.Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, peneliti akan mendapatkan data primer secara langsung melalui proses wawancara dengan informan yaitu : A. Stakeholder Pemerintah terdiri atas 1) Kepala DP3A Semarang atau perwakilan 2) Kepala tim pusat pelayanan terpadu Seruni Semarang atau perwakilan 3) Kepala Dinas Pendidikan Semarang atau perwakilan 4) Kepala Dinas Sosial Kota Semarang atau perwakilan B.Stakeholder NGO/lembaga masyarakat terdiri atas 1) Perwakilan Tim Penggerak PKK Kota Semarang 2) Perwakilan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang C. Swasta terdiri atas 1) perwakilan APSAI Kota Semarang 2) Pewakilan Bank Mandiri Kota Semarang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak langsung dari sumbernya contohnya melalui buku, jurnal, dan media massa. Data sekunder pada penelitian ini, didapatkan melalui berbagai buku, jurnal, dan media massa terkait dengan program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009), mengumpulkan data bisa dilakukan pada berbagai tempat, beberapa sumber & cara. Melalui metode kualitatif, penghimpunan data dijalankan pada situasi alamiah, sumber data primer serta teknik penghimpunan data lebih kepada observasi berperan serta, wawancara menyeluruh & dokumentasi (Sugiyono,2009). Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik penghimpunan data antaralain:

1) Wawancara

Wawancara adalah alat untuk membuktikan informasi & keterangan yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara mendalam. Dimana wawancara mendalam *(in-depth interview)* merupakan langkah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab disertai tatap muka antara pewawancara dengan informan baik menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak, dimana orang yang mewawancarai & informan terlibat pada kehidupan sosial relatif lama (Sutopo 2006: 72). Melalui teknik wawancara mendalam, peneliti ingin menggali

informasi secara mendalam dari informan mengenai bagaimana peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT.

Peneliti memilih informan sesuai dengan persyaratan seperti orang yang jujur, dapat dipercaya, memahami bagaimana peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT di Semarang dan pejabat berwenang yang terkait dengan pelaksanaan peran setelah itu peneliti akan membuat panduan wawancara (*interview guide)* guna membimbing peneliti dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan terkait peran stakeholder dalam program pencegahan KDRT di Semarang.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari dokumen - dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, *legal drafting*. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan dan lain sebagainya. Studi dokumentasi ini, adalah studi penyempurna dari pengamatan & wawancara, dalam teknik dokumentasi ini, peneliti akan menggunakan dokumen berupa catatan, rekaman audio, dan foto dari informan terkait bagaimana peran stakeholder dalam program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

1.8.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Melalui pengumpulan data peneliti akan mengolah semua data yang ada. Data dianalisis memakai metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan secara komprehensif data yang diperoleh pada proses penelitian. Pengolahan data kualitatif melalui analisis data di lokasi. Melalui model Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 246) sebagai berikut:

a) Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi bermakna meringkas, menentukan poin-poin utama & penting untuk dicari topik & bentuknya. Tahap ini peneliti akan menentukan informasi yang relevan & tidak relevan terkait penelitian. Melalui tahap reduksi data akan mengecil, semakin sedikit serta mengarah pada poin permasalahan sehingga dapat menghasilkan penggambaran jelas terkait obyek penelitian & mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

b) Penyajian Data

Langkah berikutnya adalah mendisplaykan atau menampilkan data. Data ditampilkan pada bentuk tabel & narasi penjelasan secara deskriptif.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya pada analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 252) adalah pengambilan simpulan, setelah seluruh data

ditampilakan inti masalah sebagai obyek penelitian bisa dimengerti & maka diambilah kesimpulan yang menjadi hasil penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Guna mencegah penyimpangan data pada analisis, maka keabsahan data harus diuji menggunakan beberapa cara. Menurut William dalam Sugiyono (2014) cara untuk melakukan triangulasi terdiri atas : 1) Triangulasi sumber yaitu uji validitas dengan mengecek data dari sumber yang berbeda 2) Triangulasi teknik yaitu uji kredibilitas dengan mengecek data terhadap sumber melalui teknik yang berbeda 3) Triangulasi waktu yaitu uji data melalui sumber yang sama tetapi berbeda waktu.

Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu suatu teknik mencari ketepatan informasi tidak hanya mencari sumber informasi melalui wawancara satu informan saja, namun dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa informan yang berbeda yang kemudian dipastikan kebenarannya melalui analisis data hasil wawancara sesuai kondisi nyata di lapangan.